

Religion, Customs, and Village Government in Collaborating the Pillars of Rural Development

Yulius Luturmas*

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki, Indonesia

Abstract

This research is entitled Collaborative Pillars of Rural Development, which is located in Latdalam Village, South Tanimbar District, Tanimbar Islands Regency, Maluku Province. With a qualitative descriptive model, researchers took field data to obtain scientific facts related to How Collaborative Pillars Drive Latdalam Village Development. And the results of this study are (1) the communication of the driving pillars of village development in the village of Latdalam (Village Government, Churches, and Customary Institutions) needs to be maximized; (2) Commitment from the driving pillars and the community needs to be implemented with high development and awareness, and suggestions are given to this problem, namely: Implementation of the concept of Collaborating the village driving pillars in Latdalam, because healthy collaboration will create healthy ones, and be an example which is good for the next generation to maintain and develop the concept of collaboration in subsequent developments.

Keywords: Religion, Customs, Village Government, Collaborative Pillars of Movers, Village Development.

1. Pendahuluan

Desa adalah unit terkecil dalam negara. Negara terbentuk dari akumulasi atau penggabungan desa-desa yang secara berjenjang membentuk kecamatan, kabupaten/Kota, Provinsi bahkan negara itu sendiri. Sudah tentu desa memiliki pengaruh yang sangat penting, sangat dibutuhkan oleh negara, bahkan sebagai akar rumput pertumbuhan negara, menyerap nutrisi pertumbuhan dan mengalirkan keseluruhan elemen bangsa, itulah desa. Sebagai pemimpin di desa, Kepala desa juga memiliki tugas dan tanggungjawab yang sangat berat dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan bangsa itu sendiri (Jovani, 2016; Suci-Dharmayanti et al., 2019; Widya, Agustiawan, Fibrian, & Muttaqin, 2016).

Pembangunan desa pada dasarnya adalah suatu proses perubahan dan pembaharuan berlangsung di desa dan dalam kehidupan masyarakat yang sedang berjalan, yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan tujuan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa agar dapat hidup secara layak dan sejahtera. Pembangunan desa mempunyai nilai strategis dan ciri-ciri khusus dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilnya terutama bagi kepentingan desa dan masyarakat pedesaan yang cukup besar jumlahnya. Penduduk desa sebagai bagian terbesar dari penduduk Indonesia, merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional (Amalia & Syawie, 2015; Kartika, 2012; Sarip, Syarifudin, & Muaz, 2020; Sukmawati, 2013).

Pelaksanaan pembangunan di desa tidak dapat dilepaspisahkan dengan keterkaitan elemen-elemen masyarakat di desa. Khususnya di Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku, peran Pemerintah Desa, Lembaga Adat, dan Gereja yang disebutkan dengan Pilar Pembangunan Desa. Komunikasi yang harmoni antara ketiga unsur besar ini akan medatangkan sukacita tersendiri dalam memacu pertumbuhan dan perkembangan desa itu sendiri (secara khusus) dan negara Indonesia (secara umum) (Nur, 2018; Salaputa, Madani, & Prianto, 2013; Wattimena & Hattu, 2021).

Pembangunan desa yang dilakukan oleh desa itu sendiri diarahkan sepenuhnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Keterlibatan pemerintah desa bersama dengan elemen-elemennya yang memberikan

* Corresponding author.

E-mail address: luturmasyulius@gmail.com

layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi, stabilitas ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, dll sehingga dapat memberdayakan seluruh sumberdaya yang dimiliki desa untuk desa itu sendiri dan bagi negara Indonesia (ANDIKA, 2021; Madiarsih, Widiawati, & Hartanto, 2020; Suyanto, 2001). Selain itu, peranan Pihak gereja yakni Gereja Protestan Maluku (GPM), Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII), dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) selalu memberikan penguatan mental spiritual yang mengajarkan kebaikan serta membentuk insan yang religius dalam menunjang pembangunan itu sendiri. Dan Lembaga Adat yang diberi “SOA” diketuai oleh “kepala Soa” sangat membantu dalam memberikan penguatan adat istiadat, penyelesaian persoalan dilingkungan soa itu sendiri. Nama jika dilihat secara langsung, maka sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di desa. mengingat masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada dipedesaan (Lestari, Subhi, & Anderson, 2018; Sikome, Gosal, & Singkoh, 2017; Sudarsana, 2018). maka bagi kelangsungan kegiatan pembangunan di prioritaskan kepada pembangunan di pedesaan, sehingga dapat dikatakan keberhasilan pembangunan nasional akan tercermin dari keberhasilan pembangunan di pedesaan. Yang menjadi Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Kolaborasi Pilar penggerak Pembangunan Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi antara Pemerintah desa, Pihak Gereja, dan Lembaga Adat sebagai penggerak pembangunan di Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Kolaborasi

Menurut (Dorisman, Muhammad, & Setiawan, 2014), Secara umum Kolaborasi adalah hubungan antar organisasi yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi sumberdaya, berbagi manfaat, dan bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah. Kolaborasi yang sesungguhnya memang mengharuskan komponen-komponen yang terkait untuk mengarahkan pandangan untuk satu visi yang sama, tujuan yang sama. Disamping itu pula, kolaborasi dimaksudkan agar dapat saling memperkuat dalam bentuk komunikasi yang harmonis, saling memberi dan menerima informasi yang berguna, mengoptimalkan sumber-sumberdaya yang dimiliki bersama untuk kepentingan bersama, manfaat yang diperoleh juga dapat dirasakan secara bersama, dan dalam penyelesaian masalahpun dilakukan secara bersama-sama. Ini berarti kebersamaan yang membangun adalah kunci daripada kolaborasi itu sendiri (Aprilyanto, Apriyadi, Winugroho, Widana, & Wilopo, 2021; Apriyadi & Amelia, 2020).

2.2. Pembangunan

Dimana ada sebuah organisasi/wadah yang memiliki legalitas secara hukum, biasanya mengarahkan visi untuk sebuah pembangunan dalam perspektif organisasi/wadah itu sendiri. Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia (Januarti, Heridadi, Sukendro, Apriyadi, & Ruskar, 2021; Yulianto et al., 2021). Dalam jurnalnya, (Alfiaturrahman, 2016) memberikan gambaran definisi tentang Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga. Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga – lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pembrantasan kemiskinan absolut. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pembangunan itu sendiri secara umum merupakan hal mutlak yang mestinya diprioritaskan dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan visi membangun, dipastikan ada perubahan yang berpihak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga ada perbaikan-perbaikan untuk membenahan masyarakat itu sendiri (Sumbung, Suman, Hidayat, & Kindangen, 2012).

2.3. Pembangunan desa

Konsep pembangunan desa pada masa Orde Baru, strategi pembangunan desa dilakukan dengan memadukan berbagai sektor kedalam pembangunan desa terpadu, yang berupaya membuat standarisasi tatanan kehidupan desa. Implementasi

strategi pembangunan desa ini secara signifikan telah membawa perubahan, terutama dalam mobilitas fisik dan sosial orang desa (Kurniawan, 2015).

Menurut (Atmojo, Fridayani, Kasiwi, & Pratama, 2017) pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bisa menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan.

Pembangunan desa memang diarahkan sepenuhnya hanya kepada kesejahteraan masyarakat. Dan ketika tatanan kehidupan masyarakat ditingkat desa telah diatur secara baik, maka progres pembangunan masyarakat secara nasional akan berada pada angka yang stabil dan bahkan terjadi peningkatan yang luar biasa.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Metode ini secara umum memberikan keleluasaan kepada peneliti dalam pengambilan keputusan yang didasarkan oleh beberapa data dan informasi dari beberapa informan atau narasumber (Arikunto, 2011; Moleong, 2018). Pengambilan/pengumpulan data Primer dan data sekunder menggunakan teknik Wawancara, Observasi, dan Studi Pustaka (Secara Online dan offline);

Penetapan informan dalam penelitian ini terdiri dari unsur Pemerintah Desa Sebanyak 2 orang, Unsur BPD sebanyak 1 orang, Toko agama sebanyak 1 orang, Tokoh Adat Berjumlah 1 Orang, Tokoh Masyarakat Sebanyak 2 orang. Sehingga total informan sebanyak 7 (tujuh) orang. Informan yang ditetapkan ini merupakan orang-orang yang dipandang cakap dan mampu dalam memberikan keterangan, penjelasan, pernyataan, dan data terkait penelitian ini.

Setelah itu data dianggap cukup, maka dianalisa dengan prosedur awal yaitu mereduksi data. Reduksi data yaitu penyederhanaan tentang data yang diperoleh dari lapangan dengan demikian mempermudah peneliti dalam memilih data apa saja yang harus digunakan dan dibuang, selain itu, reduksi data juga dilakukan untuk merubah data menjadi bentuk poin-poin agar lebih mudah untuk mengolah ke tahap selanjutnya. Dalam penelitian ini terdapat observasi dan wawancara dalam bentuk cerita maupun tanya jawab. Setelah itu dilakukan penyajian data. Dalam penyajian data ini dilakukan setelah peneliti melakukan reduksi data, dengan menggunakan proses koding atau kategorisasi yang telah dibuat oleh peneliti. Penyajian data dapat memberikan informasi kepada peneliti terhadap data yang diperoleh dengan cara melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada saat wawancara dan observasi. Dan dapat menemukan hasil data yang sudah dipilih sebagai penyajian data. Dan yang berikut adalah menarik kesimpulan yang berasal dari pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data, sehingga peneliti dapat mengetahui apa saja yang terjadi dan peneliti dapat melihat pola-pola fenomena yang terjadi sehingga memunculkan kesimpulan yang jelas terperinci.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari sumbernya, maka hasil penelitian ini dapat dideskripsikan/digambarkan dalam 3 (tiga) bagian besar yaitu:

4.1. Pembangunan Di Desa Itu Penting;

Hasil komunikasi dari berbagai sumber referensi dan juga pernyataan dan keterangan daripada ketujuh informan, terdapat persamaan persepsi terkait pembangunan di desa itu sendiri. digambarkan bahwa pembangunan di desa merupakan hal yang patut diutamakan dan dilakukan secara baik, profesional, dan bertanggungjawab. Karena yang menjadi aktor sasaran utama pembangunan desa tersebut adalah masyarakat desa itu sendiri.

4.2. Penggerak Pembangunan desa

Desa memiliki komponen-komponen yang membentuk suatu kesatuan. Untuk memacu pertumbuhan pembangunan di desa tidak terlepas dari peranan pihak-pihak yang menggerakkan pembangunan itu sendiri. Secara sederhana dapat dirincikan sebagai berikut:

4.2.1 Pihak Pemerintah Desa

Dalam pertanyaan awal yang mengarahkan pandangan terkait pihak yang bertanggungjawab penuh terhadap pembangunan di desa, setelah dilakmaka dapat dirincikan jawaban informan dalam Tabel 1, yaitu:

Tabel 1. Jawaban Informan terkait Penanggungjawab Utama Pembangunan

Informan	Pernyataan/Jawaban
Badan Permusyawaratan Desa (D.M)	<i>“Pemerintah desa merupakan wakil Tuhan yang dipilih secara demokratis dalam menyelenggarakan pembangunan di desa, memiliki tugas dan fungsi mempergunakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh desa untuk menghadirkan pembangunan yang maksimal kepada desa itu sendiri, Biasanya kita bermitra dengan Pihak Gereja, dan juga 8 lembaga adat (8 Soa),”</i>
Pemerintah Desa (O.M)	<i>“Kita Sebagai Unsur Pemerintah desa memang punya tanggung jawab yang besar terhadap desa dalam segala hal. Tanggung jawab ini berat, namun kita tidak bias sendiri. Perlu dukungan dari semua pihak”</i>
Tokoh Masyarakat (S.D)	<i>“Berbicara terkait pembangunan desa, secara administratif adalah kerjanya pemerintah desa, tetapi ingat, untuk menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri, perlu didukung oleh seluruh komponen di dalam desa”</i>

Pemerintah desa merupakan pihak yang bertanggungjawab secara penuh terkait pembangunan di desa itu sendiri. secara konseptual, pemerintah desa memiliki tanggungjawab secara penuh terhadap pelaksanaan pembangunan di desa. Sebagai aktor utama dalam menggagas dan memberikan layanan pembangunan yang optimal di desa, maka pemerintah desa sewajibnya mempergunakan segenap potensi yang dimiliki (SDA & SDM), tidak lain hanya untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Hal ini secara administratif dikuatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6, tahun 2014 Tentang desa, tepatnya pada Bab IV Kewenangan Desa Pasal 26 (1) yang berbunyi “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.

4.2.2 Pihak Gereja

Selanjutnya ketika diarahkan pertanyaannya terkait peran Gereja dalam menggerakkan pembangunan di desa, diperoleh jawaban informan terkait hal dimaksud, dan dapat digambarkan dalam Tabel 2 di bawah ini

Tabel 2. Jawaban Informan terkait Peran Gereja Dalam Pembangunan

Informan	Pernyataan
Tokoh Agama (I.L)	<i>“dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kita (Gereja) ada di bawah komando pemerintah. namun dalam tatanan desa, gereja memiliki pengaruh yang cukup besar untuk memberikan motivasi, mendorong, bahkan menggerakkan umat untuk menunjang progam-program pembangunan Desa, mengajak Umat/Masyarakat untuk tetap setia terhadap instruksi Pemerintah, Karena dalam keyakinan sungguh bahwa Pemerintah desa dipilih oleh Allah,”</i>
Pemerintah Desa (E.Y)	<i>Kalau mau dibilang, Gereja adalah mitra kerja pemerintah desa, gereja memiliki cara tersendiri untuk membina mental spiritual masyakat untuk menghargai dan menghormati pemerintah desa, serta mendukung program-program pembangunan yang diatur oleh pemerintah desa itu sendiri.</i>
Tokoh Masyarakat (M.T)	<i>Secara langsung dalam aktifitas setiap hari, di desa ini ada 3 unsur besar yang mampu menggerakkan masyarakat Desa Latdalam ini. yang pertama pemerintah desa, terus Gereja, dan yang paling terakhir itu tua-tua adat.</i>

fungsi gereja itu sendiri yang memang sangat dibutuhkan dalam menggerakkan segenap umat/masyarakat. Menggerakkan untuk mendukung program-program gereja itu sendiri, namun tidak terlepas dari itu, gereja juga memiliki tanggungjawab moral, gereja juga harus mampu memberikan kontribusi pembangunan desa dengan segala daya, kemampuan serta kapasitas yang dimiliki oleh gerja,

4.2.3 Lembaga Adat

Selanjutnya ketika diarahkan pertanyaannya terkait peran lembaga adat dalam menggerakkan pembangunan di desa, diperoleh jawaban informan terkait hal dimaksud, dan dapat digambarkan dalam Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Jawaban Informan terkait Peran Gereja Dalam Pembangunan

Informan	Pernyataan
Tokoh Masyarakat (M.T)	<i>Setiap desa memiliki tatanan adat masing-masing, dan tidak heran, peranan lembaga adat yang dikoando oleh “Kepala Soa” di Desa Latdalam ini juga sangat membantu pemerintah desa untuk menggerakkan anggota soa untuk menunjang pembangunan, dan bahkan masyarakat sangat menghargai suara dari pimpinan soa</i>
Tokoh Adat (J.P.N)	<i>Kami kepala soa, walaupun kecil dalam pandangan mata, namun setidaknya kami memiliki nilai dalam pembangunan, suara kami juga didengar oleh masyarakat, dan kadang dengan senang hati sebagian besar masyarakat mengikuti arahan, nasihat, bahkan petunjuk dari kami, salah satunya untuk menunjang dan mendukung pembangunan di desa kita tercinta ini</i>
Pemerintah Desa (O.M)	<i>Memang Kepala desa itu adalah kepala pemangku adat di desa, namun lebih berperan dari sisi adat adalah kepala-kepala soa. Mereka sangat membantu pemerintah desa dalam melakukan pembangunan desa. Kami pemerintah desa, sangat bangga memiliki mereka.</i>

Kecil di pandang mata, namun besar peranannya dalam menggerakkan. Itulah fungsi lembaga adat. Merupakan salah satu dari beberapa mitra desa, yang menunjang pembangunan desa. di Desa Latdalam, ada 8 soa yang dapat drincikan sebagai berikut : Soa Olinger Otarempun, Soa Batu Lelempun, Soa Mamdirkyora, Soa Mahoak, Soa Anausu, Soa Resa, Soa Rumdai, dan Soa Mahaluruk.

Kedelapan soa ini memiliki tanggungjawab moral menajaga dan melestarikan tatan adat dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Latdalam.

4.3. Permasalahan dalam pembangunan desa;

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pembangunan di Desa Latdalam belum terlalu maksimal dijalankan di Desa Latdalam:

4.3.1 Komunikasi

Pertanyaan diarahkan kembali terkait komunikasi pilar pembangun desa, maka didapat tanggapan informan disajikan dalam Tabel 4.

Komunikasi yang santun akan melahirkan sebuah persamaan pendapat dan pandangan. Namun sebaliknya komunikasi yang tidak santun akan melahirkan permasalahan yang tidak kunjung mendapatkan solusinya. Faktor komunikasi sangat berperan penting dalam memacu partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan dengan lapang dada dan komitmen yang tegu tanpa ada paksaan, sehingga pilar pembangunan desa juga harus mampu memaksimalkan komunikasinya untuk pembanguna desa itu sendiri.

4.3.2 Komitmen;

Komitmen merupakan bentuk keseriusan seseorang melakukan/mengerjakan sesuatu. Dengan berkomitmen, seseorang dapat melakukan dengan sepenuh hati dan maksimal sebuah hal. Begitupun dalam bentuk pembangunan di desa, komitmen daripada seluruh komponen desa sangat diperlukan. Bukan hanya pimpinan, dan stakeholder, namun seluruh masyarakat desa. Mengapa demikian? Karena jika komitmen untuk membangun desa sudah ada dalam sebuah kesatuan yang utuh, maka hal tersebut akan menjadi dasar pergerakan pembangunan desa yang dapat mencapai maksimal. Tabel 5 akan diuraikan respon daripada informan terkait komitmen.

Tabel 4. Jawaban Informan terkait Komunikasi Pilar Pembangunan Desa

Informan	Pernyataan
Tokoh Agama (I.L)	<i>“Komunikasi itu baik adanya. Tergantung cara kita berkomunikasi dan menghargai orang yang sementara berkomunikasi dengan kita. Hal ini dapat membuat kitamencerna secara bijak hal yang diucapkan dan informasi yang didengarkan”</i>
Tokoh Masyarakat (S.D)	<i>“kalau dilihat secara kasat mata, komunikasi antara stakeholder di desa belum terlihat serius, kadang komunikasinya lancar, kadang suam-suam kuku, manusia kadang kalau memang bicara hal yang baik tapi tidak mau direspon secara baik, harus bicara lebih keras biar cepat direspon”</i>
Tokoh Masyarakat (M.T)	<i>“Komunikasi cacat dan tidak terlalu bagus, perlu diperbaiki dan dipererat hubungan antara 3 lembaga tersebut”</i>
Pemerintah Desa (O.M)	<i>“apresiasi terhadap komunikasi lintas sektor yang selama ini dibangun antara 3 lembaga tersebut. Namun cuma perlu lebih diperkuat lagi agar komunikasi tersebut makin bermakna dan menghadirkan pemikiran yang menunjang pembangunan di Desa Latdalam.</i>

Tabel 5. Jawaban Informan terkait Komitmen Pembangunan Desa

Informan	Pernyataan
BPD (D.M)	<i>Komitmen membangun menggebu-gebu, padahal kesedaran diri belum maksimal, permasalahan komitmen timbul kadang di masyarakat, dalam posisi tertentu terlihat juga untuk komponen desa yang lain</i>
Tokoh Adat (J.P.N)	<i>Bicara komitmen itu gampang, pelaksanaannya yang sulit, itulah permasalahan kita dalam temui pembangunan</i>
Tokoh Agama (I.L)	<i>Gereja secara totalitas sangat berkomitmen untuk membangun desa, namun sebagai manusia ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam komitmen tersebut, salah satunya yaitu keseriusan dalam komitmen dan pelaksanaannya. Komitmen itu diaplikasikan bukan dikonsepskan tanpa bukti nyata</i>
Pemerintah Desa (E.Y)	<i>Pemerintah mana yang tidak memiliki koitmen membangun desa? Semua itu tidak bisa dilakukan tanpa duungan dari elemn-elemen di desa dan lebih utama dari masyarakat itu sendiri. Kadang sulit jua untuk meminta keseriusan sebagian masyarakat untuk mengaktualisasikan komitmen tersebut dalam kehidupan. Kadang pemerintah desa disalahkan jika ada kekurangan dalam pembangunan, tanpa dievaluasi secara menyeluruh, dan tanpa data yang jelas, masyarakat menuduh pemerintah tidak memiliki komitmen, itulah posisi pemerintah haru tetap bertahan dengan semuanya dan terus membenahi diri untuk memberikan pelayanan pembangunan secara maksimal kepada masyarakat</i>
Tokoh masyarakat (S.D)	<i>Komitmen Pemerintah desa perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat memperbaiki prasangka buruk terhadap pemerintah desa itu sendiri.</i>

Dengan demikian ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam hal komitmen ini. Komiten,serta implementasi pembangunan perlu ditingkatkan agar penilaian masyarakat terhadap pemerintah desa akan menjadi lebih baik. Karena jika kepercayaan masyarakat telah tumbuh dan mendukung pemerintah, maka seluruh agenda pembangunan akan menjadi lebih lancar dan sukses.

4.3.3 Kelaborasi yang harmonis

Permasalahan terkait komunikasi dan komitmen dalam pembangunan tersebut dapat diselesaikan dengan konsep kolaborasi. Dengan berkolaborasi, ada sebuah perpaduan antara berbagai pihak yang saling mendukung, memiliki tujuan atau visi yang sama, sehingga tujuan – tujuan tersebut dapat digapai secara bersama pula. Dalam ketika peneliti mengarahkan pertanyaan terkait dengan kolaborasi, semua informan dengan senang hati sangat mendukung konsep tersebut. Bahkan semua informan sangat antusias ketika konsep ini dihidupkan kembali dan dijalankan secara maksimal. Kolaborasi juga dapat memunculkan perkembangan dalam organisasi dan merealisasikan visi bersama dalam lingkungan yang kompleks Kolaborasi antara pemerintah desa, gereja, dan lembaga adat perlu dimaksimalkan, dalam bentuk Pembangunan desa secara fisik dan non fisik, Pembangunan masyarakat desa yang religius, Menghidupkan budaya dan tradisi adat desa, dan Pembinaan serta penyelesaian permasalahan masyarakat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: Komunikasi pilar penggerak pembangunan desa di Desa Latdalam (Pemerintah Desa, Gereja, dan Lembaga Adat) perlu dimaksimalkan, dan Komitmen daripada pilar penggerak pembangunan desa dan masyarakat perlu diimbangi dengan implementasi dan kesadaran yang tinggi. Oleh Karena itu peneliti menawarkan beberapa solusi yang ditawarkan untuk permasalahan penelitian ini adalah Implementasi konsep Kolaborasi pilar penggerak pembangunan di Desa Latdalam, karena dengan berkolaborasi yang sehat, akan menciptakan pembangunan yang sehat, dan menjadi contoh yang baik bagi generasi penerus untuk mempertahankan dan mengembangkan konsep kolaborasi dalam pembangunan-pembangunan selanjutnya.

Acknowledgements

Peneliti menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan masukan yang membangun terhadap penelitian ini, terlebih kepada Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan Pemerintah Desa Latdalam dan juga kepada Civitas Akademika Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki yang telah memberikan fasilitas sehingga luaran penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

References

- Alfiaturrahman, P. (2016). Perencanaan pembangunan desa di desa bagan limau kecamatan ukui kabupaten pelalawan. *VALUTA*, 2(2), 251–267.
- Amalia, A. D., & Syawie, M. (2015). Pembangunan Kemandirian Desa melalui konsep pemberdayaan: Suatu Kajian dalam perspektif sosiologi. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(2).
- ANDIKA, C. (2021). Peran Kepala Desa dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. *JUHANPERAK*, 2(2), 99–109.
- Aprilyanto, Apriyadi, R. K., Winugroho, T., Widana, I. D. K. K., & Wilopo. (2021). Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Komunitas Perkotaan. *PENDIPA Journal of Science Education*, 2021: 5(3), 284-291. <https://doi.org/10.33369/pendipa.5.3.284-291>
- Apriyadi, R. K., & Amelia, R. (2020). Tingkat Pengetahuan Kesiapsiagaan Resiko Bencana Tsunami disaat Pandemi Covid-19. *PENDIPA Journal of Science Education*, 5(1), 56–62. <https://doi.org/10.33369/pendipa.5.1.56-62>
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmojo, M. E., Fridayani, H. D., Kasiwi, A. N., & Pratama, M. A. (2017). Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo. *ARISTO*, 5(1), 126–140.
- Dorisman, A., Muhammad, A. S., & Setiawan, R. (2014). KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 19(1), 71–84.

- Januarti, R. T., Heridadi, H., Sukendro, A., Apriyadi, R. K., & Ruskar, D. (2021). Socio-economic resilience of Pidie Jaya to against disaster in the terms of national security. *E3S Web of Conferences*, 331, 2006. EDP Sciences.
- Jovani, A. (2016). Belajar Dari Desa: PKK Sebagai Organisasi Gerakan Perempuan. *ARISTO*, 4(1), 146–157.
- Kartika, R. S. (2012). Partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(3), 179–188.
- Kurniawan, B. (2015). desa Mandiri, desa Membangun. *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta*.
- Lestari, N. M., Subhi, M., & Anderson. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Bank Sampah Kota Batu. *Prosiding Seminar Nasioanl Lingkungan Lahan Basah*, 311–316.
- Madiarsih, N. C., Widiawati, D., & Hartanto, A. D. (2020). ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM HIBAH POKMAS TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP)*, 3(2), 312–321.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nur, A. R. (2018). *Hukum Sebagai Alat Komunikasi Sosial*. Gepedia.
- Salaputa, I., Madani, M., & Prianto, A. L. (2013). Peran aktor dalam penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1).
- Sarip, S., Syarifudin, A., & Muaz, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 10–20.
- Sikome, J., Gosal, R., & Singkoh, F. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesehatan Lingkungan Di Desa Kisihang Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Sitaro. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Suci-Dharmayanti, A. W., Handayani, B. L., Kurniawati, D., Purbasari, D., Pradana, G. H., & Hanantara, A. (2019). Pemetaan potensi desa sebagai model untuk membangun desa sehat dan mandiri (studi kasus: Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso). *E-Prosiding SNasTekS*, 1(1), 67–76.
- Sudarsana, I. K. (2018). Membentuk Karakter Anak Sebagai Generasi Penerus Bangsa Melalui Pendidikan Anak Usia Dini. *Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya*, 1(1).
- Sukmawati, A. W. (2013). Agen Perubahan dan Peranannya terhadap Kondisi Sosial Masyarakat di Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. *Journal of Educational Social Studies*, 2(1).
- Sumbung, G., Suman, A., Hidayat, K., & Kindangen, P. (2012). Peran Gereja Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Tomohon Sulawesi Utara. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 15(4), 8–14.
- Suyanto, B. (2001). Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 14(4), 25–42.
- Wattimena, J. A. Y., & Hattu, V. V. (2021). Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan Ham Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Sasi*, 27(2), 247–266.
- Widya, M. A. A., Agustiawan, Y., Fibrian, I. D., & Muttaqin, Z. (2016). Upaya Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Menggunakan Teknologi Informasi: Rancang Bangun Sistem Informasi di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. *Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, 2(2), 51–59.
- Yulianto, S., Apriyadi, R. K., Aprilyanto, A., Winugroho, T., Ponangsera, I. S., & Wilopo, W. (2021). Histori Bencana dan Penanggulangannya di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Keamanan Nasional. *PENDIPA Journal of Science Education*, 5(2), 180–187. <https://doi.org/10.33369/pendipa.5.2.180-187>